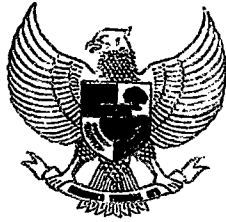


26/Nov 10/21



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 April 2021

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.

di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 892.1/2361/SJ
TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2021

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan kesempatan bagi Putra/Putri Warga Negara Republik Indonesia untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. SPCP IPDN Tahun 2021 dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pendaftaran peserta calon Praja IPDN Tahun 2021 dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran calon Siswa-Siswi/Taruna-Taruni pendidikan tinggi kedinasan mulai tanggal 9 s.d. 30 April 2021; dan
 - b. pendaftaran dilakukan secara *online/daring* melalui laman <https://dikdin.bkn.go.id/>.
2. Persyaratan dan Jadwal SPCP IPDN sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini, serta informasi lainnya terkait dengan pelaksanaan SPCP IPDN dapat dilihat pada laman <https://spcp.ipdn.ac.id>.
3. Menyebarluaskan informasi, sosialisasi, dan memfasilitasi dalam rangka kelancaran pendaftaran dan pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2021.
4. Pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2021 tidak dipungut biaya, kecuali pada tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SKD sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara. Tata cara pembayaran biaya SKD dapat dilihat pada laman <https://dikdin.bkn.go.id/> sesuai kode *billing* yang dikeluarkan oleh BKN.

5. Biaya SPCP IPDN Tahun 2021 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021.
6. Apabila terdapat pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi Calon Praja IPDN Tahun 2021 dan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah tidak benar dan termasuk dalam delik penipuan.
7. Pengaduan terhadap proses pendaftaran SPCP IPDN Tahun 2021 dapat disampaikan melalui:
 - a) Email *spcpipdn@ipdn.ac.id* selama pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2021; dan
 - b) *Call Centre* SPCP IPDN Nomor 0-804-1-700-700 pada jam kerja selama masa pendaftaran SPCP IPDN dari tanggal 9 April s.d 30 April 2021.
8. Pemberitahuan terkait lokasi pelaksanaan tes, perubahan jadwal tahapan seleksi dan informasi lainnya terkait pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2021 dapat dilihat pada laman <https://spcp.ipdn.ac.id>.

Demikian untuk menjadi perhatian.

MENTERI DALAM NEGERI,


ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta; dan
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,


R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P.
Pembina Utama Muda (K/1)
NIP. 19690818 199603 1 001



LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 892.1/2361/SJ
TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
TAHUN 2021

I. PERSYARATAN PESERTA

1. Persyaratan umum:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia peserta seleksi minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 September 2021; dan
3. Tinggi badan pendaftar bagi pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm.

2. Persyaratan administrasi:

- a. Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) termasuk lulusan Paket C, bagi lulusan Tahun 2018 s.d. 2021, dengan ketentuan:
 - 1) Nilai Rata-rata Ijazah minimal 70,00 (tujuh puluh koma nol-nol) untuk Nilai Rata-rata Rapor dan Nilai Ujian Sekolah; dan
 - 2) Nilai Rata-rata Ijazah bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat minimal 65,00 (enam puluh lima koma nol-nol) untuk Nilai Rata-rata Rapor dan Nilai Ujian Sekolah.
- b. KTP-el bagi peserta yang berusia 17 tahun atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP-el,
- c. Berdomisili minimal 1 (satu) tahun di provinsi tempat mendaftar secara sah terhitung pada tanggal awal pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Pindah (bagi yang pindah tempat tinggal) serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili, apabila terbukti melakukan duplikasi/pemalsuan/rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku;
- d. Surat Keterangan Kelas XII SMA/MA yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau pejabat yang berwenang dan dicap/distempel basah, bagi siswa SMA/MA lulusan Tahun Ajaran 2020/2021;
- e. Surat Keterangan Orang Asli Papua (OAP) khusus bagi peserta OAP yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota masing-masing dan mengetahui Ketua/Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP);
- f. Pakta Integritas;

- g. Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polri/Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - h. Surat Keterangan Tidak Buta Warna yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah/Swasta;
 - i. Alamat *e-mail* yang aktif; dan
 - j. Pasfoto berwarna ukuran foto 4x6 cm dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata, serta mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos dengan latar belakang merah.
3. Persyaratan khusus:
1. Tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan;
 2. Tidak bertindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya bagi peserta pria, kecuali karena ketentuan agama/adat;
 3. Tidak bertato;
 4. Tidak menggunakan kacamata/lensa kontak;
 5. Belum pernah menikah/kawin, bagi pendaftar wanita belum pernah hamil/melahirkan;
 6. Belum pernah diberhentikan sebagai Praja IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat;
 7. Apabila pendaftar dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai Praja IPDN, maka pendaftar:
 - a) Sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan;
 - b) Bersedia diangkat menjadi CPNS/PNS dan ditugaskan/ditempatkan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c) Bersedia ditempatkan pada proses pembelajaran di seluruh kampus IPDN;
 - d) Bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di IPDN;
 - e) Bersedia diberhentikan sebagai Praja IPDN jika melakukan Pelanggaran Disiplin Praja sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kehidupan Praja; dan
 - f) Apabila pendaftar terbukti melakukan pemalsuan identitas/dokumen persyaratan diatas, maka pendaftar dinyatakan GUGUR.

II. PENDAFTARAN PESERTA

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi SSCASN BKN <https://dikdin.bkn.go.id> dengan mengunggah melalui *scanning* dokumen sebagai berikut:

1. KTP-el bagi peserta yang berusia 17 tahun atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP-el (diunggah halaman belakang dengan *file jpg* ukuran 100-200kb);

2. Berdomisili minimal 1 (satu) tahun di provinsi tempat mendaftar secara sah terhitung pada tanggal awal pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Pindah (bagi yang pindah tempat tinggal) serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili, apabila terbukti melakukan duplikasi/pemalsuan/rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku (diunggah dalam *file pdf* ukuran 100-1.000kb)
3. Ijazah asli atau fotokopi legalisir (diunggah halaman depan dan belakang dalam satu *file pdf* dengan ukuran 100-700kb);
4. Surat Keterangan Kelas XII SMA/MA yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau pejabat yang berwenang dan dicap/distempel basah, bagi siswa SMA/MA lulusan Tahun Ajaran 2020/2021 (diunggah dalam *file pdf* dengan ukuran 100-700kb);
5. Surat Keterangan Orang Asli Papua (OAP) khusus bagi peserta OAP yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota masing-masing dan mengetahui Ketua/Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan format yang dapat diunduh pada <https://spcp.ipdn.ac.id> (diunggah dalam *file pdf* dengan ukuran 100-400kb);
6. Pakta Integritas dengan format yang dapat diunduh pada <https://spcp.ipdn.ac.id>, selanjutnya diketik dan diunggah dalam *file pdf* dengan ukuran 100-700kb;
7. Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polri/Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota (diunggah dalam *file pdf* dengan ukuran 100-500kb);
8. Surat Keterangan Tidak Buta Warna yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah/Swasta (diunggah dalam *file pdf* dengan ukuran 100-500kb); dan
9. Pasfoto berwarna ukuran foto 4x6 cm dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata, serta mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos dengan latar belakang merah (diunggah dalam *file jpg* ukuran 100-200kb).

Dalam dokumen KTP-el atau KK dan ijazah mencantumkan data yang sama untuk nama dan tempat tanggal lahir. Apabila pendaftar tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi pendaftaran di atas maka pendaftar dinyatakan GUGUR.

III. JADWAL PELAKSANAAN SPCP IPDN TAHUN 2021

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Pelamar mendaftar secara <i>online/daring</i>	9 s.d. 30 April 2021	laman https://dikdin.bkn.go.id/
2.	Pelamar membuat akun SSCASN Sekolah Kedinasan Tahun 2021		
3.	Pelamar <i>log in</i> dengan menggunakan NIK dan <i>Password</i> yang telah didaftarkan.		
4.	Pelamar memilih Sekolah Kedinasan dan mengisi biodata serta mengunggah dokumen persyaratan administrasi SPCP IPDN.		
5.	Pelamar menyelesaikan pendaftaran dengan mengecek <i>resume</i> dan mencetak bukti pendaftaran.		
6.	Verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran yang telah diunggah	10 April s.d. 3 Mei 2021	laman https://dikdin.bkn.go.id/
7.	Pengumuman verifikasi dokumen persyaratan administrasi	4 Mei 2021	laman https://dikdin.bkn.go.id/ dan laman https://spcp.ipdn.ac.id
8.	Pelamar yang memenuhi syarat verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran melakukan pembayaran PNBP Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai kode <i>billing</i> .	Mei 2021	Bank yang ditunjuk oleh BKN
9.	Pelamar yang telah melakukan pembayaran PNBP SKD mencetak kartu ujian melalui akun masing-masing.	Mei 2021	laman https://dikdin.bkn.go.id/

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
10.	Pengumuman Peserta SKD	Juni 2021	laman https://dikdin.bkn.go.id/ dan laman https://spcp.ipdn.ac.id
11.	Pelaksanaan SKD	Juni s.d. Juli 2021	Lokasi yang ditunjuk Panitia SPCP IPDN
12.	Pengumuman Hasil SKD	Juli 2021	laman https://dikdin.bkn.go.id/ dan laman https://spcp.ipdn.ac.id
13.	Pelaksanaan Tes Kesehatan Tahap I	Juli s.d. Agustus 2021	Rumah Sakit Bhayangkara/ Biddokkes POLDA
14.	Pengumuman Hasil Tes Kesehatan Tahap I	Juli s.d. Agustus 2021	laman https://spcp.ipdn.ac.id
15.	Pelaksanaan Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran	Juli s.d Agustus 2021	Psikologi POLDA
16.	Pengumuman Hasil Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran	Juli s.d. Agustus 2021	laman https://spcp.ipdn.ac.id
17.	Pantukhir a. Verifikasi Faktual Dokumen Persyaratan Administrasi Pendaftaran b. Tes Kesehatan Tahap II c. Tes Kesamaptan dan Pemeriksaan Penampilan	Agustus 2021	Rumah Sakit Bhayangkara/ Biddokkes/ POLDA
18.	Pengumuman Hasil Pantukhir	Agustus 2021	laman https://spcp.ipdn.ac.id

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
19.	Registrasi Calon Praja bertempat di IPDN Kampus Jatinangor	September 2021	Kampus IPDN Jatinangor

Catatan:



Diharapkan peserta selalu *update* informasi pelaksanaan SPCP (antara lain perubahan jadwal, lokasi pelaksanaan tes dan informasi lainnya) pada laman <https://spcp.ipdn.ac.id>.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum



R. Gani Muhammad, S.H., M.H.,
Pembina Utama Madya (IV/e)
NIP. 19690818 199603 1 007